PERAN UMKM DALAM MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN

Muhammad Faiz Akbar¹, Hidayat², Joni Hendra³
m.faizakbar122@gmail.com¹, toahidayat593@gmail.com²,
joni_hendra77@yahoo.co.id³
STAIN Bengkalis

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam membangun ekonomi kerakyatan. UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan pendapatan. Penelitian ini mengkaji peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui analisis data primer dan sekunder, ditemukan bahwa UMKM mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing produk lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses modal terbatas, pemasaran yang kurang efektif, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Kata Kunci: UMKM, Ekonomi Kerakyatan, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of the Indonesian economy which plays an important role in building a people's economy. MSMEs make a significant contribution to Gross Domestic Product (GDP), employment, and income equality. This research examines the strategic role of MSMEs in encouraging inclusive and sustainable economic growth. Through primary and secondary data analysis, it was found that MSMEs are able to strengthen national economic resilience, increase the competitiveness of local products, and create new jobs. However, MSMEs still face various challenges such as limited access to capital, ineffective marketing, and low human resource capacity. Therefore, comprehensive government policies and support from various parties are needed to encourage sustainable MSME growth, so as to strengthen the foundation of the people's economy in Indonesia.

Key words: MSMEs, Citizen Economy, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. UMKM memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam aktivitas ekonomi serta pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Konsep ekonomi kerakyatan telah lama menjadi cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pemberdayaan UMKM, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang luas, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi. UMKM juga berperan penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dengan mengandalkan kekuatan produksi dalam negeri dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

Meskipun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses modal terbatas, pemasaran yang kurang efektif, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang peran strategis UMKM dalam membangun ekonomi kerakyatan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kontribusi sektor ini dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal. UMKM juga berperan dalam menciptakan keterkaitan ekonomi antara sektor formal dan informal, serta memperkuat rantai pasok dan distribusi barang dan jasa .

Di Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 60% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Namun, kontribusi sektor ini masih belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, rendahnya produktivitas, serta kurangnya penguasaan teknologi dan inovasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk memberdayakan UMKM melalui penyediaan akses permodalan yang terjangkau, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi akses pasar, serta dukungan kebijakan dan regulasi yang kondusif. Dengan memberdayakan UMKM, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang luas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan kesejahteraan ekonomi sebagai landasan bagi pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) untuk mengeksplorasi peran UMKM dalam membangun ekonomi kerakyatan di Indonesia . Kajian pustaka merupakan metode yang sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan literatur yang relevan dari berbagai sumber untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian pustaka ini meliputi:

1. Identifikasi dan pengumpulan literatur Literatur yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, publikasi organisasi internasional, dan sumber-sumber kredibel lainnya. Pencarian dilakukan melalui database online, perpustakaan, dan mesin pencari akademik.
2. Evaluasi dan seleksi literatur Literatur yang terkumpul dievaluasi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kualitas informasi yang disajikan. Literatur yang memenuhi kriteria ini kemudian diseleksi untuk digunakan dalam kajian pustaka.
3. Analisis dan sintesis literatur Literatur yang terpilih dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, temuan-temuan penelitian, dan perspektif-perspektif yang relevan dengan peran UMKM dalam membangun ekonomi kerakyatan. Kemudian, informasi dari berbagai sumber diintegrasikan dan disintesis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik penelitian.
4. Pembahasan dan interpretasi Berdasarkan analisis dan sintesis literatur, dilakukan pembahasan dan interpretasi yang kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang peran UMKM dalam membangun ekonomi kerakyatan di Indonesia. Potensi, tantangan, dan strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat peran

UMKM dibahas secara mendalam.

Melalui kajian pustaka ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran strategis UMKM dalam membangun ekonomi kerakyatan di Indonesia, serta rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan kontribusi sektor ini dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Pentingnya UMKM

Ekonomi kerakyatan merupakan suatu paradigma pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai kerakyatan, kebersamaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini mengacu pada sistem ekonomi yang mengutamakan peran serta masyarakat secara luas dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Prinsip-prinsip utama ekonomi kerakyatan meliputi pemerataan kesempatan berusaha, keadilan dalam upaya meraih kemakmuran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu pilar utama dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian dari bawah, memperluas lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing bangsa. Karakteristik UMKM di Indonesia sangat beragam, mencakup usaha-usaha di sektor pertanian, industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Berdasarkan kriteria aset dan omset, UMKM di Indonesia diklasifikasikan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional Indonesia sangatlah signifikan. Data terakhir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sektor ini juga menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, menjadikannya sebagai tulang punggung penyerapan tenaga kerja di tanah air. Selain itu, UMKM berperan penting dalam pemerataan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran kota.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis yang sangat penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. UMKM merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi dari bawah, yang bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Keberadaan UMKM yang tersebar luas di seluruh penjuru negeri memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan produktif, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan.

Selain itu, UMKM berperan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan UMKM yang tersebar di daerah-daerah pedesaan, pinggiran kota, maupun perkotaan, memungkinkan terjadinya aliran ekonomi dan distribusi manfaat pembangunan secara lebih merata. UMKM menjadi katalisator bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi di tingkat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat setempat. Ini menjadikan UMKM sebagai pilar utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Lebih lanjut, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan basis industri lokal. UMKM memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan

keterampilan, dan membangun kemandirian ekonomi. Dengan mengandalkan sumber daya lokal, UMKM mampu mengembangkan produk-produk yang unik dan khas, serta memperkuat daya saing industri lokal di pasar domestik maupun global.

UMKM juga berperan sebagai tulang punggung rantai pasok dan distribusi barang dan jasa di Indonesia. Keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh wilayah memungkinkan terjadinya keterkaitan ekonomi antara sektor formal dan informal, serta memperkuat rantai nilai dan distribusi produk. Ini menjadikan UMKM sebagai mitra strategis bagi usaha besar dalam mengoptimalkan efisiensi dan daya saing industri nasional.

Oleh karena itu, pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi kunci dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Dengan memberdayakan UMKM, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang luas, peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta penguatan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang bertumpu pada kekuatan produksi dalam negeri. Inilah esensi dari ekonomi kerakyatan, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi dan menikmati hasil-hasilnya secara adil dan merata.

2. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi UMKM

Meski memiliki peran strategis dalam ekonomi kerakyatan, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang menghambat perkembangan dan pertumbuhannya. Berikut adalah penjelasan panjang mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi UMKM:

Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah akses permodalan dan sumber pendanaan yang terbatas. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari keluarga dan kerabat, yang jumlahnya sangat terbatas. Akses terhadap kredit perbankan dan sumber pembiayaan lainnya seringkali menjadi kendala bagi UMKM karena persyaratan yang ketat, agunan yang diperlukan, serta kurangnya pemahaman tentang skema pembiayaan yang tersedia. Minimnya akses terhadap modal menjadi penghambat bagi UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta berinvestasi dalam teknologi dan inovasi.

Tantangan lain yang dihadapi UMKM adalah masalah pemasaran dan akses pasar yang terbatas. Banyak UMKM masih bergantung pada pasar lokal dan memiliki keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global. Kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran yang efektif, minimnya keterampilan negosiasi, serta keterbatasan informasi pasar menjadi hambatan bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pemasaran produk mereka.

Produktivitas dan daya saing UMKM juga menjadi isu penting yang perlu ditangani. Sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala dalam hal efisiensi produksi, pengendalian kualitas, dan standarisasi produk. Rendahnya produktivitas ini dapat memengaruhi daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan di pasar domestik maupun global. Selain itu, banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi baru, melakukan inovasi produk, serta beradaptasi dengan perubahan tren pasar yang dinamis.

Kapasitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi juga menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM. Sebagian besar UMKM dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan dalam hal keterampilan manajerial, pengetahuan bisnis, dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia ini dapat menghambat produktivitas,

efisiensi, dan kemampuan UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi melalui upaya yang sistematis dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas akses pasar, serta mendorong adopsi teknologi dan inovasi. Hanya dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, UMKM dapat mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

3. Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan UMKM

Untuk mengoptimalkan peran UMKM dalam membangun ekonomi kerakyatan di Indonesia, diperlukan strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk memberdayakan sektor ini.

Strategi utama yang perlu diterapkan adalah penyediaan akses permodalan yang terjangkau bagi UMKM, baik melalui kredit perbankan maupun skema pembiayaan alternatif lainnya. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan bunga yang terjangkau bagi UMKM. Selain itu, dapat dikembangkan skema pembiayaan berbasis komunitas, seperti koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro, yang lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan UMKM.

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) UMKM juga menjadi prioritas penting. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan program-program pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran, dan penguasaan teknologi bagi pelaku UMKM. Peningkatan kapasitas SDM ini akan membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha mereka.

Fasilitasi akses pasar dan promosi produk UMKM juga menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan. Pemerintah dapat memfasilitasi UMKM untuk berpartisipasi dalam pameran dagang, membangun platform online untuk memasarkan produk UMKM, serta mempromosikan produk-produk unggulan UMKM di pasar domestik dan internasional. Selain itu, pembentukan pusat-pusat layanan UMKM di daerah juga dapat membantu UMKM dalam mendapatkan informasi pasar dan strategi pemasaran yang efektif.

Pengembangan kemitraan dan keterkaitan industri antara UMKM dengan usaha besar juga perlu didorong. Kemitraan ini dapat mencakup pola inti-plasma, subkontrak, atau kerjasama dalam rantai pasok dan distribusi. Melalui kemitraan ini, UMKM dapat meningkatkan akses pasar, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk. Selain itu, kemitraan ini juga dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung yang kuat dan saling menguntungkan.

Terakhir, kebijakan insentif dan regulasi yang mendukung UMKM juga perlu diimplementasikan. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, seperti keringanan pajak atau subsidi, untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Selain itu, penyederhanaan proses perizinan dan regulasi yang ramah bagi UMKM juga perlu dilakukan untuk mengurangi beban birokrasi dan memberikan iklim usaha yang kondusif.

Strategi dan kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan memberdayakan UMKM melalui strategi ini, diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia, menciptakan

lapangan kerja yang luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Pemberdayaan UMKM dalam membangun ekonomi kerakyatan di Indonesia membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memberdayakan UMKM:

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung UMKM, seperti penyediaan akses permodalan, fasilitasi pemasaran, insentif fiskal, serta perlindungan hukum bagi UMKM. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat lokal, sesuai dengan konteks dan kebutuhan UMKM di masing-masing daerah.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan lain, seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Kemitraan dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, sangat penting untuk menyediakan akses permodalan yang terjangkau bagi UMKM. Lembaga keuangan dapat berperan dalam menyalurkan kredit atau skema pembiayaan khusus bagi UMKM, serta memberikan pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan usaha.

Kemitraan dengan perguruan tinggi juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia UMKM. Perguruan tinggi dapat berperan dalam menyelenggarakan program-program pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pemasaran, serta penguasaan teknologi dan inovasi bagi pelaku UMKM. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat berkontribusi dalam melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk UMKM, serta memberikan konsultasi bisnis dan pendampingan bagi UMKM.

Organisasi masyarakat, seperti asosiasi UMKM, koperasi, atau lembaga swadaya masyarakat, juga memiliki peran penting dalam memberdayakan UMKM. Organisasi-organisasi ini dapat menjadi wadah bagi UMKM untuk saling berbagi pengalaman, informasi, dan jaringan. Mereka juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan UMKM, serta menjadi penyambung lidah bagi aspirasi dan kebutuhan UMKM di lapangan.

Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga menjadi faktor penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pemasaran. Pemerintah dapat berperan dalam memfasilitasi akses UMKM terhadap teknologi digital, seperti membangun platform e-commerce, memberikan pelatihan pemasaran digital, serta mendorong adopsi teknologi dalam proses produksi dan manajemen usaha UMKM.

Terakhir, monitoring dan evaluasi kebijakan UMKM secara berkala juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Pemerintah dapat melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi ini, serta menerima masukan dan saran untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan memanfaatkan peran masing-masing secara optimal, diharapkan upaya pemberdayaan UMKM dalam membangun ekonomi kerakyatan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, perguruan

tinggi, organisasi masyarakat, dan UMKM itu sendiri akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada kekuatan produksi dalam negeri.

KESIMPULAN

UMKM memegang peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi besar terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja. UMKM berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari bawah, menciptakan lapangan kerja, pemeratakan pembangunan, serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Namun, UMKM masih menghadapi tantangan seperti akses permodalan terbatas, pemasaran kurang efektif, produktivitas rendah, dan kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan. Untuk mengoptimalkan perannya, diperlukan strategi komprehensif meliputi akses permodalan terjangkau, pengembangan kewirausahaan, fasilitasi akses pasar, kemitraan industri, serta kebijakan pendukung. Pelaksanaan strategi ini membutuhkan peran aktif pemerintah dan kemitraan dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat dalam penyediaan modal, peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM. Dengan memberdayakan UMKM secara optimal, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja luas, peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, serta penguatan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional sesuai semangat ekonomi kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Anggraeni, W. C., Ningtyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65.
- Elfia Sukma, dkk. 2016. Kompetensi Kognitif Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar. *Jurnal Gramatika*. Vol. 2, No.11.
- F.N. Arifah. 2022. Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangannya. *Jurnal Bidang Kesejahteraan Rakyat*. Vol. 14, No. 7.
- Fajar & Nina Witasari.2020. Penguatan Kesiapan Sekolah dalam Menghadapi Implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN 8 Semarang. *Jurnal Puruhita*. Vol. 4, No.1.
- Faradilla, D. (2020). Kontrol diri dengan ketergantungan internet pada remaja. *Jurnal Ilmia Psikologi*. Vol. 8, No. 4.
- Fayola, A. D., & Rahmawati, R. 2023. Urgensi Kesiapan Guru Dan Sekolah Terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*. Vol. 1. No. 8.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ... & Waris, L.2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Get Press.
- Gede dan Ni Ketut Sudianing Sandiasa. 2021. Pelaksanaan Administrasi dan Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19. *Jurnal Widya Publika*. Vol. 9 No. 2.
- Harefa, D. 2019. Peningkatan prestasi rasa percaya diri dan motivasi terhadap kinerja guru IPA. *Media Bina Ilmiah*, Vol. 13, No. 10.
- Hasan, M., Mainuddin, M., Rahmah, N., Mulati, T. S., Hasyim, S. H., Rif'ati, B., ... & Khasanah, U. 2023. TELAAH KURIKULUM: TEORI & PENGEMBANGANNYA. Klaten : Penerbit Tahta Media.
- Hasanudin. 2018. Obsesi Pekerjaan yang diinginkan Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah setelah Lulus. *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*. Vol. 8, No.2.
- Haslina, dkk. 2017. Kinerja Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013 pada SMA Negeri 5

- Lhokseumawe. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol.5, No.4.
- Hero, H., & Sni, M. E. 2018. Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas V Di Sekolah Dasar Inpres Iligetang. *JRPD . Jurnal Riset Pendidikan Dasar*. Vo. 1, No. 2.
- Heronica, Meriza. Kinerja Guru Kelas Dalam Implementasi K13 di Sekolah Dasar: Studi Deskriptif pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung. Tesis.Universitas Pendidikan Indonesia. 2020.
- Irawati, D., Masitoh, S., & Nursalim, M. 2022. Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai Landasan Pendidikan Vokasi di Era Kurikulum Merdeka. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 7. No. 4.
- J Hamidah. 2022. Pelatihan Penyusunan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Kepala Sekolah dan Guru-Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banjar-Kalimantan Selatan. *Jurnal Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat*. Vol. 4.
- Jannah, M. M., & Rasyid, H. (2023). Kurikulum merdeka: Persepsi guru pendidikan anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 7, No. 1.
- Kamijan, Y. (2021). Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kinerja Guru Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2, No. 5.
- Kemendikbud, "Merdeka Belajar: Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar" Jakarta: Makalah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia, 2019,.
- Khoirurijal. 2022. Pengembangan Kurikulum Merdeka. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Khusni, M. F., Munadi, M., & Matin, A. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di MIN 1 Wonosobo. *Jurnal Kependidikan Islam*. Vol. 12, No. 1.
- Lailatussaadah.2015. Upaya Peningkatan Kinerja Guru. *Jurnal: Intelektualita*, Vol.3, No.1.
- Mabsutsah, Nikmatin dan Yushardi. 2022. Analisis Kebutuhan Guru terhadap E Module Berbasis STEAM dan Kurikulum Merdeka pada MAteri Pemanasan Global. *Jurnal Pendidikan MIPA*. Vol.12, No. 2.
- Mekarisce, A. A. 2020. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*. No. 12, Vol. 3.
- Murdani, M., & Hadromi, H. (2019). Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (studi di kelurahan kandri kecamatan gunungpati kota semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2), 152-157.
- Muslim, A. Q., & Wekke, I. S. 2018. Model penilaian kinerja guru. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*. Vol. 11, No. 1.
- Muslimin, M. 2020. Program Penilaian Kinerja Guru dan Uji Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Guru. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*. Vol. 4, No. 1. Mustaghfiroh, Siti. 2019. Konsep Merdeka Belajar Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*. Vol. 3, No.1.
- Naufal H., Irkhami I., dan Yuliyani M. 2020. Penelitian Penerapan Program Sistem Kredit Semester Menunjang Terealisasinya Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Pekalongan. *Jurnal Konferensi Ilmiah Pendidikan*, Vol.1 No.1 .
- Naufalin, L. R. (2020). Tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(1), 95-102.
- Nugroho, R. H., & Andarini, S. (2020). Strategi pemberdayaan UMKM di pedesaan berbasis kearifan lokal di era industri 4.0 menuju era society 5.0. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 1(01).
- Nurhayati, N., Mukti, A., Wesnedi, C., Munawar, S., & Maisah, M. 2022. Kinerja kepala sekolah kinerja kepala sekolah, disiplin kerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*,. Vol. 3, No. 2.
- Pangestu, N. S., & Yuniyanto, T. N. H. (2019). Proses berpikir kreatif matematis siswa extrovert dan introvert SMP kelas VIII berdasarkan tahapan Wallas. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*. Vol. 8, No. 2.
- Pritandhari, M. (2022). Peran UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia*, 1, 61.

- Pritandhari, M. (2022). Peran UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia*, 1, 61.
- R. Rahayu, Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *JURNAL BASICEDU*. Vol. 6, No. 4.
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. 2022. Potret kurikulum merdeka, wujud merdeka belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*,. Vol. 6, No. 4.
- Rahmat, Rizal. 2018. Implementasi Discovery Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Listrik Dinamis. *Jurnal Siliwangi: Seri Pendidikan*. Vol. 4, No. 1.
- Rahmawati, D. Y., Wening, A. P., Sukadari, S., & Rizbudiani, A. D. 2023. Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran IPAS Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*. Vol. 7. No. 5..
- Raibowo, S., Nopiyanto, Y. E., & Muna, M. K. (2019). Pemahaman guru PJOK tentang standar kompetensi profesional. *Journal Of Sport Education (JOPE)*. Vol. 2, No.1.Hal. 10-15.
- Risdiantoro, R. 2021. Pengaruh Pelatihan Guru Terhadap Kinerja Guru Melalui Pengembangan Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Batu. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vo. 1, No. 2.
- Rizal, R. (2019). Evaluasi Kinerja Guru IPA. *MadrasatunA: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*. Vol. 2. No. 2.
- Rokhmah, B. E., & Yahya, I. (2020). Tantangan, Kendala, dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 20-31.
- S. Julaeha, Hadiana, E., & Zaqyah, Q. Y. 2021. Manajemen Inovasi Kurikulum: Karakteristik dan Prosedur Pengembangan Beberapa Inovasi Kurikulum. *MUNTAZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 01.
- Saifullah, S. 2020. Determinasi Motivasi dan Kinerja Guru Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kompetensi Profesional Guru (Studi Kasus di SMA N Negeri 1 Kota Bima) *Literature Review Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. Vol. 1, No.2.
- Satori, D.D.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Septi, Y. 2021. *Perencanaan Merdeka Belajar Berbasis Literasi dalam Pembelajaran IPA*. Tesis. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Styaningrum, F. (2021). Konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 656-663.
- Sugihartono. *Psikologi Pendidikan*. 2013. Yogyakarta : UNY Press. Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulkipli, Nurapni Aulia. 2023. *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Prestasi Siswa pada SMP Negeri 1 Makassar*. Tesis.
- Sumarsih, Ineu. T.M.2022. “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar”. *Jurnal Basicedu*. Vol.6, No.5.
- Suratin. 2022. *Upaya Meningkatkan Kinerja Guru dalam Memahami Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka melalui Supervisi Akademis dengan Penguatan Workshop di SMA Binaan Kota Metro Tahun Pelajaran 2022/2023*. *Jurnal Guru Indonesia*.
- Susanto, Ahmad. 2016. *Konsep Strategi dan Implementasi Manajemen peningkatan Kinerja Guru*. Bandung: Penerbit PRENADA MEDIA.
- Sutisna, I. 2020. *Statistika penelitian*. Universitas Negeri Gorontalo. Vol. 1. No.1.
- Syahrani, M. (2020). *Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. *Primary Education Journal (Pej)*. Vol. 4, No. 2.
- Syarif, A. Hamid. 2012. *Pengembangan Kurikulum*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Tim Penyusun, "Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ". (Wonosobo: UNSIQ PRESS LP3M UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo 2019).
- Tindangen, M., & Ruchaemi, A. 2021. Peningkatan Kinerja Guru IPA Dalam Mengimplementasikan Standar Proses Melalui Pendampingan Sejawat (Peer Coaching) Di Kabupaten Kutai Barat. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol. 2,

No. 1.

- Tindaon, Juwita, dkk. 2023. Hubungan Kinerja Guru di Masa Peralihan Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas V SD Negeri 040443 Kabanjahe Tahun Pelajaran 2022/2023. *Jurnal Pendidikan*. Vol. 7, No. 1.
- Tri.S.R.C. (2020). Pengaruh Work From Home(WFH) terhadap Kinerja Guru SD Negeri Dengkek 01 Pati Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*. Vol. 2, No.1.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01-08.
- W Herwina. 2021. Optimizing Student Needs and Learning Outcomes With. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 35, No.2.
- Wartoyo, F. X. 2022. Menakar Korelatifitas Merdeka Belajar dengan Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pancasila. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*. Vol 4. No. 2.
- Winata, I. K. 2021. Upaya Peningkatan Kinerja Guru IPA Dalam Melaksanakan Pembelajaran Pada Siswa Kelas XI Melalui Pembinaan in House Training. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*. Vol. 5, No. 2.
- Windasari, I. Y., Prasetyowati, D., & Shodiqin, A. (2020). Analisis pemahaman konsep berdasarkan teori apos pada materi barisan geometri di kelas XI SMA Negeri 1 Godong. *Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. Vol. 2, No. 5.
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(1), 01-14.
- Zulaiha, S., Meisin, M., & Meldina, T. 2023. Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*. Vol. 9. No. 2.